

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI SMA NEGERI 2 DUMOGA

Riska Srihandayani Djoyosuroto

riskasrihandayani@gmail.com

SMA Negeri 2 Dumoga – Sulawesi Utara

Dwi Wahyu Prasetyono

Sri Mulyani

Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

This study aims to describe and analyzing the Smart Card Indonesia program (KIP) in SMA N 2 Dumoga as well as describe and analyzing anything be motivate and blocked the implementation of the Smart Card Indonesia Program (KIP). This study using the descriptive approach qualitative. The subject this study is the Head of the School, the teacher manager KIP at SMA N 2 Dumoga, student recipients KIP and the students parents. The object research on the management implementation policy of the Smart Card Indonesia Program (KIP) academic years 2015/2016 at SMA N 2 Dumoga. The data collected through a method interview and documentation. The validity of the data done by the triangulation of data. The data analyzed with the way the reduction of data, presentating data and the with draw of the conclusion. The result of the research suggests that the target of KIP at SMAN 2 Dumoga, especially for 2015 stage VI number 23 students who entirely have KIP. Factors supporters the implementation of KIP: information from the official rountinely to school and online. Obstacle factor: an evaluation of the KIP program carried out every period of the cause of the changes in the mechanism as well as the deviation funds KIP.

Keywords: policy of implementation, Smart Card Indonesia, management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru pengelola KIP SMA Negeri 2 Dumoga, siswa penerima KIP beserta orang tua siswa. Obyek penelitian mengenai pengelolaan implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun ajaran 2015/ 2016 di SMA Negeri 2 Dumoga. Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran KIP di SMA Negeri 2 Dumoga khususnya untuk tahun 2015 tahap VI berjumlah 23 siswa yang seluruhnya memiliki KIP. Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara *online*. Faktor penghambat: evaluasi dari program KIP yang dilaksanakan setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan pada mekanisme serta terjadinya penyelewengan dana KIP.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Kartu Indonesia Pintar, pengelolaan

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan NKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sosial. Pendidikan juga merupakan modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah serta berperan strategis dalam menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan bangsa. Ketika tingkat pendidikan dikatakan tinggi, setidaknya menggambarkan bahwa pola pikir dan peradaban masyarakat di daerah tersebut juga tentunya sudah baik.

Upaya-upaya pemerintah mengenai pendidikan perlu dihargai. Namun juga perlu komitmen dan konsistensi pelaksanaan yang jelas dan tepat sasaran di tataran sekolah. Tujuannya agar peningkatan mutu sekolah, sehingga lulusan-lulusan yang handal akan terpenuhi. Keberhasilan pelajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor diri sendiri, guru, sarana belajar, dan lingkungan.

Setiap sekolah harus bisa mengetahui secara mendetail apa saja yang sebenarnya dibutuhkan. Baik kebutuhan intern maupun lingkungan hingga diharapkan dapat membuat kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian adalah kelangsungan pendidikan bagi para pelajar yang dari segi ekonomi mengalami banyak hambatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2016 mencapai 28,01 juta orang. Di provinsi Sulawesi Utara

jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 berjumlah 202,8 ribu jiwa. Meskipun jumlah penduduk miskin tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya (pada tahun 2015), pendidikan tetap harus diutamakan. Pendidikan diyakini menjadi pemutus rantai kemiskinan.

Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan 'Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara' dan dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa 'Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia'.

Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang mengancam anak-anak. Berbagai program dicanangkan, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada PKH, rumah tangga miskin diberi uang tunai sama dengan program BLT, tapi dalam PKH ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu uang tunai hanya diberikan jika anak-anak usia sekolah dalam keluarga tersebut benar-benar masih bersekolah. Sasaran PKH cukup jelas, yaitu agar anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin terjamin haknya untuk memperoleh pendidikan sampai sekolah menengah atas. Dengan pendidikan yang memadai diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan yang terjadi pada orang tua dan keluarganya sehingga tidak berlanjut ke anak-anak generasi berikutnya.

Berikutnya pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik, namun masih banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya. Penyebabnya antara lain kesulitan orangtua atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan

pendidikan yang lain seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi maupun biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung dana BOS. Hal inilah yang melatar belakangi dikembangkannya Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Selain program PKH, BLT, BOS dan BSM upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang menghalangi penyelenggaraan pendidikan adalah Program Indonesia Pintar yang diwujudkan dengan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini merupakan program nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Program ini untuk memutus rantai angka putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia. Anak yang telah terdaftar mengikuti Program Indonesia Pintar atau sebagai penanda anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu mendapat manfaat dari Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar merupakan penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang ditujukan kepada anak usia sekolah untuk membantu biaya keperluan sekolah. Harapannya peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat tercukupi kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang proses pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah anak putus sekolah.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau mereka yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mereka yang memperoleh KIP berasal dari tingkat SD sampai SMA dan

sederajat. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan sumber data penerima KIP tahun 2016 berjumlah 19.547.510 anak.

Di Sulawesi Utara, tepatnya di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat sebuah sekolah, yakni SMAN 2 Dumoga, yang mengalami hal yang sama, yakni penerima bantuan tidak menggunakan seutuhnya bantuan yang diterima untuk kepentingan biaya pendidikan di sekolah. Sekitar 85% dana bantuan digunakan untuk kepentingan biaya pendidikan, sedangkan 15% lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga, Sulawesi Utara. Selain itu juga untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, misalnya penelitian Budi Widodo (2016) dengan judul 'Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di SMK Cokroaminoto Mandak'. Hasil penelitian ini menunjukkan Aspek Antecedents (kesiapan penerima PIP) termasuk kategori baik, yang ditunjukkan dengan rata-rata persentase kesiapan penerima PIP (Program Indonesia Pintar) yaitu sebesar 78,75%. Kemudian Aspek Transaction (pelaksanaan PIP) termasuk kategori baik yang ditunjukkan dengan rata-rata persentase pelaksanaan PIP yaitu sebesar 74,61%. Pada Aspek Outcomes (pemanfaatan PIP) termasuk kategori sangat baik yang ditunjukkan dengan rata-rata persentase pemanfaatan PIP yaitu sebesar 86,51%. Faktor pendukung pemanfaatan PIP antara lain: (1) adanya pendataan awal siswa miskin, (2) tim pelaksana PIP selalu sama, (3) kebijakan sekolah mengelola dana PIP. Faktor penghambat pemanfaatan PIP: (1)

kurangnya sosialisasi tentang PIP, (2) pemberitahuan informasi yang selalu mundur, (3) waktu pencairan tidak sesuai dengan kebutuhan, (4) tidak ada monitoring dari dinas terkait. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas Program Indonesia Pintar. Perbedaannya, peneliti memfokuskan pada KIP yang merupakan wujud pelaksanaan Program Indonesia Pintar, sedangkan penelitian Budi Widodo membahas secara umum pengelolaan Program Indonesia Pintar dan implementasinya di suatu sekolah.

Penelitian berikutnya oleh Triana Desita Sari (2017) berjudul 'Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mendukung pemanfaatan KIP, masyarakat telah menggunakan dana KIP sesuai prosedur, yakni untuk membiayai iuran sekolah, transportasi sekolah, membeli pakaian dan perlengkapan sekolah seperti tas dan sepatu sekolah, untuk membiayai biaya tambahan praktik pembelajaran seperti ujian kompetensi dan latihan ujian, les atau bimbingan belajar. Kecenderungan tindakan masyarakat juga positif atau mendukung karena dana KIP yang diberikan tepat sasaran atau dalam hal ini benar diberikan kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi.

Penelitian lainnya dari Devi Juli Wulansari (2017) yang berjudul 'Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Kartu Indonesia Pintar Menggunakan Metode *Simple Additive Weighting*'. Hasilnya diketahui bahwa pendistribusian KIP sering kali tidak tepat sasaran karena perhitungan penerima KIP masih menggunakan sistem manual dan belum terkomputerisasi. Perhitungan manual dirasa semakin tidak efektif bagi staf yang bertugas dalam masalah pencacahan data masyarakat. Perhitungan data masyarakat melalui pemutakhiran basis data terpadu masih

berupa kumpulan form yang perlu diolah dengan sistem yang pasti dan tanpa unsur subjektif. Demi mempermudah pekerjaan dan menghindari kesalahan perhitungan data dengan sistem lama maka dibangunlah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu mengambil keputusan penerima KIP secara cepat dan lebih akurat dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

TINJAUAN TEORETIS

Pendidikan dan tujuan pendidikan

Pengertian pendidikan menurut Undang Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) menyatakan pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan akhiran 'an' yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Pengertian pendidikan menurut bahasa yakni perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran.

Adapun tujuan pendidikan di Indonesia dalam Bab II Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Kebijakan pendidikan

Menurut Rusdiana, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran. Selanjutnya menurut *The Lexicon Webster Dictionary*, yang dimaksud dengan kebijakan adalah: “ ... *policy*, *n. pl. policies*, (*politia*, *Gr. Politeia. Polity*): *The principles on which any measure or course of action is based, the line of conduct which the rulers of a nation adopt on particular questions especially with regard to foreign countries prudence or wisdom of governments or individuals in the management of the affairs, public or private; general prudence or dexterity of management; sagacity*” yang dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dari berbagai kegiatan (Rusdiana, 2015:32)

Menurut Tilaar dan Riant Nugroho dalam Rusdiana (2015: 38), kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu.

Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan penggabungan dari kata *educational* dan *policy*. Kebijakan adalah seperangkat aturannya, sedangkan pendidikan menunjukkan pada bidangnya, yakni bidang pendidikan (Rusdiana, 2015:142). Kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang dibuat oleh yang berwenang agar tujuan dalam sistem pendidikan dapat tercapai dengan baik.

Van Meter dan Van Horn (dalam Rusdiana, 2015:132) menyatakan implementasi kebijakan dimaksudkan

sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Tujuan kebijakan berupa tindakan-tindakan yang merupakan usaha mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program KIP adalah keputusan kebijakan yang ditempuh pemerintah. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, perlu dilakukan perkuatan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2015, sebagai langkah awal pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Penyiapan langkah perkuatan didasarkan pada strategi pembangunan nasional dengan norma-norma pembangunan yaitu membangun manusia dan masyarakat, mengupayakan peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan, memberikan perhatian khusus pada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan, aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Seluruh norma pembangunan menjadi acuan pembangunan nasional untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

Perkuatan kebijakan pembangunan nasional di tahun 2015 difokuskan pada tiga dimensi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pemerataan dan kewilayahan, pemenuhan kondisi perlu dan pelaksanaan *quick wins* dan program

lanjutan. Pembangunan manusia utamanya difokuskan pada pemenuhan kewajiban dasar yaitu pembangunan pendidikan, kesehatan serta pembangunan perumahan, air minum dan sanitasi. Sumber Daya Manusia yang berkualitas sebagai modal utama pembangunan tidak akan tercapai jika tidak ditunjang dengan peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan manusia yang unggul dan berdaya saing. Manusia Indonesia unggul diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif.

Pembangunan pendidikan yang berkualitas berperan penting untuk melahirkan SDM yang bermutu, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, dan berdaya saing. Dalam tahun 2015, upaya meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas antara lain akan dilaksanakan melalui wajib belajar 12 Tahun, yaitu untuk memenuhi hak seluruh penduduk terhadap pelayanan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas.

Kartu Indonesia Pintar bertujuan menghilangkan halangan bagi anak usia sekolah/siswa kurang mampu agar memperoleh akses pelayanan pendidikan yang berkualitas, mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa kurang mampu untuk bersekolah kembali, dan membantu siswa kurang mampu memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan, antara lain pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, dan lainnya.

Kurangnya biaya untuk bersekolah akibat biaya pendidikan pada jenjang SMP dan SMA yang cukup tinggi, mendorong pemerintah mengeluarkan bantuan yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu agar dapat mengkomodasi kebutuhan-kebutuhan

anak yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk bersekolah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian non-eksperimen yang berbentuk survei dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau disebut juga dengan *penelitian evaluasi*.

Menurut Sedarmayanti (2002:33), metode kualitatif adalah metode penelitian yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Moleong dalam Arikunto (2013: 21), ada sebelas karakteristik penelitian kualitatif yang harus dipenuhi, yaitu, latar alamiah, manusia sebagai alat, metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar (*grounded theory*), deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Lokasi penelitian di SMA N 2 Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi dilapangan, yang meliputi implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Adapun nara sumber adalah Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan orang tua siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Data sekunder, data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta dokumen-dokumen, meliputi daftar siswa penerima bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), daftar nama guru dan staf tata usaha, daftar sarana dan prasarana dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada beberapa nara sumber yaitu: Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa penerima KIP. Berikutnya, mendokumentasikan hasil wawancara. Sugiyono (2010: 329) menyatakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. H.B Sutopo (2002:69) berpendapat mencatat dokumen disebut juga *content analysis* dan peneliti bukan hanya sekadar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip tetapi juga maknanya yang tersirat. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen tentang administrasi bantuan KIP di SMA Negeri 2 Dumoga.

Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif dalam penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan memiliki sifat-sifat kualitatif. Adapun teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komponensial yang merupakan teknik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terinci.

Untuk memperkecil kesalahan yang mungkin saja terjadi berkaitan dengan penentuan informan dan teknik wawancara serta untuk meningkatkan kualitas data dalam penelitian, maka

digunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan kombinasi dari beragam sumber data, peneliti, teori dan metodologi dalam suatu penelitian atas gejala sosial yang terjadi. Mikkelsen (2011;298-299) mengatakan, dimungkinkan untuk mencapai triangulasi strategi penelitian kualitatif dengan mengombinasikan berbagai jenis metode kualitatif, strategi riset dan rencana penelitian yang konkret tergantung pada tujuan studi dan metodenya harus dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMA Negeri 2 Dumoga berpartisipasi dalam program pemerintah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sekolah ini beralamat di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara dan kultur akademik yang diterapkan di sekolah ini juga sangat baik. Kelengkapan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan sangat mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Jumlah tenaga pendidik di SMA Negeri 2 Dumoga sebanyak 21 guru dan TU sebanyak 3 orang. Peserta didik di SMA Negeri 2 Dumoga berjumlah 215 siswa yang dibagi menjadi tiga kelas dan masing-masing kelas terbagi lagi tiga rombongan belajar (rombel). Selama tiga tahun terakhir terjadi dinamika jumlah siswa yang belajar di SMA Negeri 2 Dumoga.

Hasil Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 2 Dumoga 2015/2016

Program ini dilaksanakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMA yang dikelola oleh Sub Direktorat Kelembagaan dan Peserta Didik.

Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan

pendidikan yang lainnya berguna untuk mendukung program Wajib Belajar yang bertujuan untuk mewujudkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA untuk seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan latar belakang ekonomi, status sosial, gender, dan kondisi geografis. Perlu upaya untuk mengurangi jumlah siswa SMA yang putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain.

Hal ini disampaikan Bapak Surasdin selaku Bendahara BOS yang menangani Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 2 Dumoga bahwa:

“Kartu Indonesia Pintar diberikan khususnya untuk siswa dari keluarga miskin atau sedang terkena bencana atau yatim piatu. Yang diharapkan nantinya kehidupan mereka akan berkembang, yang jelas akan berbeda perkembangan pendidikannya dan kesejahteraan siswa tersebut karena yang tadinya tidak punya uang saku kini bisa jajan. Program bantuan ini seyogyanya digunakan untuk membeli seragam sekolah, buku, alat tulis, biaya transportasi ke sekolah, uang saku dan biaya les tambahan siswa jika ada.” (W/ SM, 18/04/2017).

Siswa-siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu harus diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa untuk pemerataan kesempatan belajar dan pemerataan mutu pendidikan. Beasiswa itu adalah Kartu Indonesia Pintar dan SMA Negeri 2 Dumoga ikut

berpartisipasi dalam penyelenggaraannya agar siswa yang bersekolah tidak ada yang merasa terbebani dengan biaya pendidikan. Tiga aspek implementasi Kartu Indonesia Pintar, menurut Charles O. Jones (dalam Arif Rohman, 2001:84-85), meliputi pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

a. Pengorganisasian

Pihak sekolah selalu memerhatikan sumber-sumber daya ini beserta metode atau teknik yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam melaksanakan program KIP di SMAN 2 Dumoga, kepanitiaan dibentuk untuk mengkoordinasikan penyaluran KIP. Siswa yang diseleksi dari sekolah berdasarkan kepemilikan dari Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang lebih diprioritaskan untuk menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar. Pada tahapan ini biasanya hanya siswa yang memiliki KPS saja yang diajukan untuk menerima KIP.

Hal ini diungkapkan Pak Surasdin selaku bendahara BOS yang menangani program Kartu Indonesia Pintar (KIP):

“Tugas dari panitia ataupun koordinator KIP memang masuk dalam SK pembagian Tugas dari Kepala Sekolah dalam pembagian Tugas Guru. Sosialisasi KIP sendiri dilaksanakan beberapa kali, yaitu pertama tahun ajaran baru kepada siswa dan para wali murid. Setelah siswa sudah ditetapkan sebagai penerima, siswa dikumpulkan dan disosialisasikan tentang kemanfaatan dana KIP itu sendiri. Dimulai dari siapa saja yang berhak menerima, bagaimana cara mendapatkannya, hingga bagaimana langkah

selanjutnya setelah dana cair." (W/ SM, 18/04/2017).

b. Interpretasi

Proses awal untuk program ini yakni siswa yang memiliki KIP/KKS/KPS/PKH diusulkan sebagai calon penerima KIP di SMA Negeri 2 Dumoga. Kemudian siswa yang memiliki kartu membawa fotokopi kartu beserta fotokopi Kartu Keluarga (KK) ke sekolah lalu diserahkan ke koordinator KIP di sekolah. Koordinator kemudian bekerjasama dengan TU untuk merekapitulasi dan memverifikasi data usulan siswa.

Proses selanjutnya adalah mengirim data. Data yang telah selesai diverifikasi dan direkapitulasi oleh pihak sekolah diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peran sekolah untuk sementara selesai sampai tahap ini karena tahap penetapan siswa penerima KIP dan pencairan dana dilaksanakan oleh pusat. Peran sekolah akan dimulai kembali setelah turunnya Surat Keputusan (SK) siswa penerima KIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini dikemukakan Bapak Drs I Nyoman Sumadia, MSi selaku Kepala SMA Negeri 2 Dumoga mengenai usulan Kartu Indonesia Pintar (KIP):

"Setelah diverifikasi oleh pihak sekolah, kemudian diusulkan. Namun usulan yang dikirim tidak serta merta akan disetujui semuanya karena akan diverifikasi lagi oleh pihak terkait. Untuk SMA Negeri 2 Dumoga tahun ajaran 2015/ 2016 yang diusulkan adalah 49 siswa, tapi yang diterima hanya 23 siswa. Berikut yang belum diterima akan diusulkan lagi." (W/ NS, 21/04/2017).

Dana KIP bagi siswa di SMA Negeri 2 Dumoga kemudian dikirim langsung

melalui Bank Nasional Indonesia (BNI) 46. Pengambilan dana dilakukan setelah turunnya Surat Keputusan (SK) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi daftar nama siswa penerima KIP. Dinas Pendidikan mengirim SK ke sekolah untuk ditindaklanjuti pada SK yang terlampir. SK juga berisi peraturan pengambilan dana KIP.

c. Aplikasi

Kartu Indonesia Pintar diaplikasikan untuk membiayai pendidikan anak dari keluarga miskin atau kurang mampu agar mereka mampu bersekolah layak seperti dengan anak lainnya. Kegunaan dana tersebut untuk membeli keperluan sekolah seperti seragam sekolah, alat tulis, uang saku, dan transportasi siswa pergi ke sekolah. Besaran dana yang diperoleh siswa Rp 1.000.000 berupa uang tunai langsung diberikan pada siswa. Bagi kelas X, dana KIP dibagikan per semester Rp 500.000 diterima sebanyak dua kali. Berbeda dengan kelas XI dan XII, dan KIP dibagikan langsung Rp 1.000.000 hanya satu kali pencairan. Jadi, jumlah yang diterima adalah sama antara ketiga jenjang.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan siswa penerima bantuan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP):

"Dana yang diterima adalah Rp. 1.000.000 secara tunai. Namun, terdapat perbedaan penerimaan, dimana siswa kelas X hanya menerima Rp. 500.000 per semester, dan diterima 2 kali. Berbeda dengan siswa kelas XI dan XII, dana yang diterima Rp 1.000.000 hanya sekali cair. Jadi, pada intinya jumlah yang diterima sama besar, hanya saja waktunya yang berbeda, kelas X 2 kali menerima, sedangkan

kelas XI dan XII langsung sekali pencairan dana untuk 2 semester.” (W/ML, 20/04/2017).

Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program KIP

Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi terlaksananya implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yakni adanya faktor yang mendukung, dan ada juga faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang mendukung sekaligus menghambat implementasi kebijakan ada 4, yaitu: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan juga sistem birokrasi.

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang bisa mendukung atau bahkan bisa menghambat implementasi kebijakan yang telah dibuat. Terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan.

a. Transmisi dimaksudkan agar sebelum mengimplementasikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), keputusan telah dibuat dan perintah untuk pelaksanaan yang telah dikeluarkan harus benar-benar dipublikasikan ke masyarakat meskipun banyak hambatan-hambatan seperti pertentangan pendapat dan juga persepsi dari masyarakat dan ketidakingintahuan masyarakat secara mendetail tentang kebijakan yang telah diputuskan.

b. Jika program Kartu Indonesia Pintar (KIP) diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan harus dikomunikasikan dengan sangat jelas agar tujuan dari kebijakan tercapai dengan maksimal. Seringkali instruksi yang diteruskan ke para pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Hal ini mendorong interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

c. Konsistensi akan efektif apabila perintah-perintah pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) konsisten

dan jelas. Perintah yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan seenaknya menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan sehingga tujuan utama program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak akan tercapai sesuai sasaran.

2) Sumber-sumber

Faktor yang bisa mendukung dan menghambat implementasi dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah sumber-sumbernya. Sumber-sumber ini antara lain yang mendukung kebijakan yang efektif seperti Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perbankan sebagai wadah penyaluran KIP, dan juga guru di sekolah yang kompeten yang ditunjuk sebagai orang yang mengelola bantuan KIP yang diterima siswa.

3) Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan pun bisa menjadi faktor yang bisa mendukung dan menghambat program KIP karena jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan ini berarti ada dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan para pembuat keputusan. Namun sebaliknya, jika perilakunya menyimpang, maka jelas proses implementasi pasti akan sangat sulit.

4) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan badan yang paling sering dalam menjadi pelaksana kebijakan seperti institusi-institusi pendidikan. Contohnya institusi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, institusi perbankan, dan juga institusi sekolah. Secara umum, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 2 Dumoga dapat dipilah-pilah.

a. Faktor pendukung

Penelitian terhadap implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga memiliki beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan program ini agar dapat berjalan dengan baik. Adapun faktor

pendukung keberhasilan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga antara lain:

- Informasi yang diberikan dinas secara rutin ke sekolah dan secara *online* membuka informasi mengenai buku panduan, edaran, maupun melalui sosialisasi secara lisan selama 24 jam.
- Keputusan pemerintah pusat untuk menggunakan DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang berisi informasi siswa kelas X hingga kelas XII yang mengidentifikasi nama anak, usia, dan alamat rumah tinggal yang membantu pemerintah mendapatkan data mengenai keluarga miskin dengan lebih tepat dan akurat.
- Anak didik menjadi lebih aktif dan bersemangat karena perlengkapan sekolah dapat terpenuhi sehingga tidak merasa tertinggal dengan teman-temannya.

b. Faktor penghambat

Peneliti menemukan factor penghambat dalam implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini, yakni:

- Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilaksanakan pada setiap periode program justru menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan khususnya pada proses atau mekanismenya. Hal ini mengakibatkan pelaksana terus melakukan pemahaman terhadap mekanisme/proses baru setiap periodenya, sehingga tidak jarang pelaksana program malah merasa kebingungan dengan adanya mekanisme/proses yang baru.
- Ketika siswa telah memperoleh dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), sebagian besar dari mereka justru lupa bahwa dana

untuk biaya pendidikan bukan untuk membeli kebutuhan lain yang tidak ada hubungannya dengan sekolah.

- Sekolah sering dengan sangat terpaksa tidak membuat laporan penggunaan dana karena kesulitan dalam mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah digunakan oleh siswa. Sehingga sekolah tidak dapat mengetahui rincian penggunaan dana dari siswa apakah memang digunakan untuk keperluan pendidikan atau hanya digunakan untuk hal lain di luar pendidikan diakibatkan karena tidak adanya kuitansi.

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 2 Dumoga 2015/2016

Pemberian bantuan pendidikan ini berfungsi untuk mendukung program Wajib Belajar yang bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka.

Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain. Dengan adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan bisa mensejahterakan siswa agar dapat berkembang seperti halnya dalam kekurangan uang saku sehingga uang saku siswa dapat terpenuhi dan kekurangan pada perlengkapan sekolah juga dapat terpenuhi serta dapat

digunakan siswa untuk membeli peralatan sekolah termasuk biaya transportasi mereka ke sekolah sehingga pendidikan mereka menjadi layak dan juga terjamin serta tidak ada lagi siswa yang tidak bersekolah dengan alasan minimnya biaya pendidikan.

Dengan adanya bantuan ini, orang tua siswa dari keluarga yang kurang mampu merasa sangat beruntung karena dapat mengurangi beban biaya hidup mereka dalam membiayai anak-anak sekolah. Orang tua juga mengetahui kegunaan dari dana untuk membeli alat-alat sekolah dan biaya transportasi ke sekolah.

Di SMA Negeri 2 Dumoga Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu yang dalam keadaan sehari-harinya mengalami kekurangan begitu juga dalam membiayai anak-anak mereka. Penggunaan dana dari Kartu Indonesia Pintar mereka gunakan untuk membeli buku dan alat tulis sekolah, seragam sekolah, transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa, serta biaya les tambahan siswa jika ada.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat program KIP

Tujuan diadakan program Kartu Indonesia Pintar untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar dan menengah. Selain itu juga untuk meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan serta menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan antar daerah. Berdasarkan hasil penelitian, di SMA Negeri 2 Dumoga yang menerima dana KIP memang benar dari keluarga yang kurang mampu. Dengan adanya dana KIP, keluarga merasa sangat beruntung dapat bersekolah dengan layak serta merasa tidak terbebani dan terancam putus sekolah.

a) Pengorganisasian

Menurut Charles O. Jones dalam Arif Rohman (2001:84), pengorganisasian merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan. Pengorganisasian meliputi sasaran, sosialisasi, dan sumberdaya. Tugas dari koordinator KIP di sekolah masuk dalam SK Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi program KIP di sekolah yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru kepada siswa dan wali murid. Kemudian siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima beasiswa dikumpulkan dan disosialisasikan tentang manfaat dari dana KIP bagi siswa mulai dari siapa yang berhak menerima, bagaimana cara mendapatkannya serta bagaimana langkah selanjutnya setelah dana telah cair.

Siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga pada tahun 2015 berjumlah 26 siswa yang seluruhnya memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Siswa yang menerima bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah memenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria dari berbagai kriteria yang telah ditentukan. Kepemilikannya pun juga sudah sesuai dengan keadaan dan kondisi keluarga siswa, karena syarat kepemilikan KIP tersebut juga ditentukan dari kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Hal ini menunjukkan penggunaan Data Pokok Pendidikan dan Basis Data Terpadu cukup efektif sebagai pertimbangan dalam menentukan sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Oleh karena itu, penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar yang berasal dari SMA Negeri 2 Dumoga ini dapat dikatakan layak menerimanya yaitu dengan melihat kondisi pekerjaan orang tua mereka dan juga kondisi tempat tinggalnya masih kurang sejahtera. Tempat tinggal mereka yang dapat dikatakan jauh jaraknya dengan sekolah juga menandakan bahwa bantuan KIP sudah tepat sasaran.

Data siswa yang berhak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ditangani oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMA yang dikelola oleh Sub Direktorat Kelembagaan dan Peserta Didik dengan menggunakan Basis Data Terpadu serta Data Pokok Pendidikan yang berisi identitas siswa, kondisi keluarga siswa mampu/tidak mampu seluruh Indonesia. Setelah mempertimbangkan dan menetapkan sasaran, Kartu Indonesia Pintar dikirim melalui kantor pos kemudian diambil langsung oleh siswa yang bersangkutan dengan didampingi oleh salah seorang guru penanggung jawab KIP di sekolah. Dengan adanya program ini, siswa yang tadinya tidak dapat bersekolah karena terhalangnya biaya pendidikan, sudah dapat bersekolah, mendapatkan pendidikan yang layak.

b) Interpretasi

Sebagian bukti dari rekapitulasi dan verifikasi data siswa penerima KIP yang telah diperoleh menjelaskan bahwa pada awalnya data siswa-siswa yang memiliki KIP diusulkan oleh pihak sekolah, yang kemudian menunggu untuk dikeluarkan SK oleh pihak terkait. Ternyata tidak semua siswa yang diusulkan oleh pihak sekolah terbit SK-nya. Akan tetapi, pihak sekolah akan terus memberikan usulan bagi siswa yang dirasa pantas untuk mendapatkan bantuan KIP.

Hasil penelitian menunjukkan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang disalurkan melalui Bank Nasional Indonesia (BNI) diambil secara langsung oleh siswa di bank dengan dikawal seorang guru yang menjadi penanggungjawab. Pertimbangannya, sekolah tidak mungkin melepaskan siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke luar sekolah tanpa ada pengawasan dari pihak sekolah. Selain itu, juga berdasarkan atas surat penyaluran bantuan yang menyatakan pengambilan dana tidak boleh secara kolektif, sehingga

mengharuskan siswa penerima bantuanlah yang wajib menerima secara langsung dengan didampingi guru yang sudah ditunjuk pihak sekolah.

Program Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga pada tahun pelajaran 2015/ 2016 telah diimplementasikan. Seluruh data yang diperoleh peneliti mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga tahun pelajaran 2015/ 2016 ini telah didukung dengan mengamati dokumen yang diperoleh serta hasil wawancara yang telah dilakukan dari berbagai sumber data yang berbeda-beda.

c) Aplikasi

Menurut Charles O. Jones (Arif Rohman, 2001:84), aplikasi merupakan faktor berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. KIP yang merupakan bantuan pendidikan guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya bagi orang tua dari status ekonomi bawah/lemah dengan harapan agar bantuan ini dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah, juga mencegah anak putus sekolah.

Di SMA Negeri 2 Dumoga Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada siswa yang tergolong dari keluarga miskin atau kurang mampu dengan kondisi perekonomiannya yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam membiayai anak-anak mereka. Meskipun implementasi telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penunjang bahkan ada juga yang dapat menghambat proses implementasi.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga tahun pelajaran 2015/2016:

Faktor pendukung

Penelitian berkenaan implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga memiliki beberapa poin penting yang terkait dengan faktor yang mendukung pelaksanaan hingga program ini dapat berjalan dengan baik. Faktor pendukung keberhasilan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga:

- a. Adanya informasi dari pihak dinas ke sekolah dan secara *online* membuka informasi 24 jam mengenai buku panduan, edaran, juga melalui sosialisasi secara lisan. Meskipun demikian, pelaksana kebijakan di sekolah masih kurang memahami kebijakan dengan baik.
- b. Keputusan pemerintah pusat untuk menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi siswa kelas X hingga kelas XII. Dengan adanya DAPODIK akan teridentifikasi nama anak, usia, dan alamat rumah tinggal dari pendataan Program Perlindungan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga dapat membantu pemerintah memperoleh data mengenai keluarga yang miskin dengan lebih tepat juga akurat.
- c. Siswa menjadi lebih semangat bersekolah karena peralatan sekolah dapat terpenuhi sehingga tidak merasa tertinggal dengan teman-teman sejawatnya.

Faktor penghambat

Beberapa hal menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2015/2016. Faktor penghambat implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2015/ 2016 di SMA Negeri 2 Dumoga:

- a. Meskipun program bantuan Kartu Indonesia Pintar selalu disosialisasikan oleh pihak terkait, namun evaluasi program yang dilaksanakan pada setiap periode justru menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan khususnya pada mekanismenya. Hal inilah yang mengakibatkan para pelaksana terus melakukan pemahaman terhadap mekanisme baru setiap periodenya

sehingga yang terjadi justru terciptanya kebingungan yang dirasakan pelaksana dengan adanya mekanisme baru.

- b. Ketika siswa telah menerima dana Kartu Indonesia Pintar, mereka cenderung bisa lupa penggunaan dana yang sebenarnya untuk biaya pendidikan, bukan untuk membeli kebutuhan lain yang tidak ada kepentingannya dengan sekolah.
- c. Pihak sekolah tidak dapat mengetahui dengan pasti penggunaan dana siswa penerima bantuan apakah untuk keperluan pendidikan atau hal lain di luar pendidikan.

SIMPULAN

Siswa penerima bantuan KIP di SMA Negeri 2 Dumoga khusus untuk tahun 2015 tahap VI berjumlah 23 siswa yang seluruhnya memiliki KIP. Siswa yang menerima bantuan KIP telah memenuhi satu kriteria dari berbagai kriteria yang telah ditentukan. Kepemilikan KIP menjadi faktor utama dalam pengelolaan implementasi program bantuan pendidikan yang ditandai dengan keadaan serta kondisi keluarga siswa yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial dan juga penetapannya dengan mencocokkan data dengan Dapodik. Mekanisme pelaksanaan program bantuan ini dengan cara sekolah mengirimkan data ke Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dilanjutkan dengan mengundang siswa penerima KIP untuk diberikan informasi mengenai hal terkait. Namun perlu diketahui juga bahwa sekolah dapat mengusulkan nama siswa lain yang di luar kepemilikan KIP untuk turut diusulkan sebagai calon penerima KIP dengan sesuai kriteria sasaran yang ditetapkan.

Faktor pendukung implementasi KIP antara lain: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara *online*, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan dalam menentukan sasaran penerima program KIP, adanya rasa saling percaya

antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana program KIP, siswa menjadi lebih termotivasi karena kebutuhan peralatan sekolah dapat terpenuhi. Adapun yang menjadi faktor penghambat program KIP adalah: evaluasi program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program justru menyebabkan terjadinya perubahan terutama pada mekanismenya yang dapat mengakibatkan pihak pelaksana mengalami kebingungan, serta terjadinya penyelewengan dana KIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. 2001. *Kebijakan Pendidikan*. Fakultas Ilmu Pendidikan UNY. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Mikkelsen, Britha. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan; Panduan bagi Praktisi Lapangan*, (Matheos Nalle, Penerjemah cetakan ke-5). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung.
- Rusdiana. 2015. *Kebijakan Pendidikan; Dari Filosofi ke Implementasi*. Pustaka Setia. Bandung.
- Sedarmayanti. 2002. *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju. Bandung.
- Stiglitz, Joseph E., Sen, Amartya., Fitoussi, Jean-Paul. 2011. *Mengukur Kesejahteraan : Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan?*, (Mutiara Arumsari dan Fitri Bintang Timur, Penerjemah).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (3)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 ayat 1
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 ayat 2
- Undang Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- SUPLEMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) Tahun 2015
- LAKIP KEMENDIKBUD 2015
- Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik No. 66/07/Th. XIX, 18 Juli 2016
- Berita Resmi Statistik, BPS Propinsi Sulawesi Utara No. 50/07/71/Th. X, 18 Juli 2016
- Sari, Triana Desita. 2017. Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Universitas Lampung. Lampung.
- Sugiharto, Nursehan. 2012. Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya di Kabupaten Purwakarta. *Tesis*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial. Depok.
- Widodo, Budi. 2016. Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di SMK Cokroaminoto Mandak. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Wulansari, Devi Juli. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima Kartu Indonesia Pintar Menggunakan Metode *Simple Additive Weighting*. Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Mainotes. 2015. Definisi Pembangunan Sosial.

<http://www.mainotes.com/2015/12/definisi-pembangunan-sosial.html>
akses 31-03-2017

News Okezone. 2017. Menuju Pembangunan Indonesia.
<http://news.okezone.com/read/2017/03/24/337/1650918/menuju-pembangunan-manusia-indonesia-berkategori-tinggi> akses 31-03-2017

Sehan SZA. 2012. Teori Pembangunan Sosial Sosial.
<http://sehansnza.blogspot.co.id/2012/05/teori-pembangunan-sosial.html>
akses 31-03-2017

Jay Liem. 2017. Pengertian Pendidikan.
<http://9wiki.net/pengertian-pendidikan/> akses 01-06-2017